

PEMETAAN PERMASALAHAN POTENSI PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KTSP PENDIDIKAN DASAR DI KOTA MATARAM

Mumbrita Sulaimi, I Wayan Karta, Sukardi

FKIP Universitas Mataram

e-mail: kardi_unram@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to: (1) to map the problems in the development and implementation of KTSP on basic education units (SD / MI and SMP / MTs) in Mataram, (2) map the resource potential of Mataram city that supports the development and implementation of educational level KTSP bottom. Methodologically, this research conducted eclectic involving teachers and principals as the main subject and the students, supervisors, school committees, and curriculum developers as an informant. The selection of research subjects using the technique of stratified cluster sampling quotas. Data collected by questionnaire, the study documents, and Focus Group Discussion (FGD) to obtain quantitative and qualitative data. Overall the data are analyzed quantitatively (simple percentages and tables) and qualitatively through the three stages of data reduction, data display, and conclusion drawing / verification. The results showed: (1) Problems in developing and implementing KTSP the level of Primary Education in the City of Mataram is not KTSP development refers to the potential and characteristics of schools and the Vision, Mission, and school goals; choice of subjects is very limited local content, and teachers' difficulties implement active learning and innovative. (2) potential to be developed and implemented as local content Mulok subjects in primary education level in the city of Mataram is the potential socio-cultural and natural wealth Lombok area, production and packaging skills of a local specialty, skills and crafts typical of the area Lombok, Lombok history, regional dances, folk music and art.

Keywords: problems and potential, development and implementation KTSP.

Pendahuluan

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah

dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula bersifat sentralistis berubah menjadi desentralistis. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dimaknai sebagai diberikannya wewenang kepada satuan pendidikan untuk menyusun kurikulumnya mengacu dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah perlu segera dilaksanakan. Bentuk nyata dari desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah diberikannya kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunannya maupun pelaksanaannya pada satuan pendidikan.

Uji coba Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di lembaga pendidikan dasar dan menengah telah dilakukan sejak tahun 2004, dan hasilnya telah dimanfaatkan untuk penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP tersebut mulai dilaksanakan secara bertahap tahun 2006 pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 Pasal 1 butir 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi atau bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. KTSP disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada Panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Penerapan KTSP diharapkan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan (Depdiknas, 2005). Untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sesuai dengan SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. SNP bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan

nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdiri atas: kelompok mata pelajaran Agama dan Ahlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, IPTEK, Estetika, Pendidikan Jasmani, dan Olahraga Kesehatan.

Standar Isi dan SKL menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan pelaksanaan KTSP. Penyelenggaraan KTSP didasarkan pada Permendiknas RI Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 tentang SI, SKL, dan pelaksanaan SI dan SKL. Satuan pendidikan yang telah melakukan uji coba kurikulum Tahun 2004 secara menyeluruh dapat melaksanakan KTSP secara menyeluruh pula sejak tahun 2006/2007, sedangkan yang belum melakukan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan SI dan SKL secara bertahap selama tiga tahun, sehingga pada Tahun 2009/2010 seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah sudah melakukannya.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pengembangan dan pelaksanaan KTSP pendidikan dasar di Indonesia pada tahun 2008, diperoleh informasi masih banyaknya kekurangan dan kelemahan, bahwa penyebabnya adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan. Misalnya Kewajiban BSNP, Dinas Pendidikan/Kanwil Depag Provinsi, LPMP, Dinas Pendidikan/Kandepag Kabupaten/Kota beserta jajarannya, Pengawas, Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan KTSP pada satuan pendidikan dasar dan menengah perlu dilakukan melalui peningkatan kesiapan lembaga sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Terdapat beberapa pendekatan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan KTSP, yakni: pembelajaran berorientasi kompetensi, berbasis kelas, berdasarkan kecepatan individu, umpan balik seketika, penggunaan bahan ajar dan multimedia, guru sebagai fasilitator, dan penerapan penilaian acuan patokan. Ketentuan ini memerlukan peningkatan kesiapan penyelenggara pendidikan yang cukup besar serta memerlukan waktu yang cukup panjang. Pelaksanaan KTSP juga memerlukan beberapa kondisi, yaitu: (1) adanya peningkatan mutu, (2) adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi, (3) adanya perhatian dan partisipasi

masyarakat, (4) peningkatan akuntabilitas, (5) adanya kompetisi yang sehat antar sekolah, (6) tumbuhnya kemandirian di antara warga sekolah, (7) terwujudnya proses pembelajaran yang efektif, (8) terciptanya lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan menyenangkan, serta (9) adanya proses evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan (BNSP, 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memetakan masalah-masalah dalam pengembangan dan pelaksanaan KTSP pada satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs.) di Kota Mataram, (2) memetakan potensi sumberdaya Kota Mataram yang mendukung pengembangan dan pelaksanaan KTSP tingkat pendidikan dasar.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hamalik (2001) menyebutkan bahwa kurikulum tidak terbatas pada apa yang tertuang dalam pedoman, tetapi dalam aktualnya, ketika guru berinteraksi dengan peserta didik. Bahkan Stanley dan Shores dalam Nasution (1993) memandang kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak dan pemuda agar mereka dapat berpikir dan berbuat sesuai dengan masyarakatnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 1 Ayat 5 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan (Depdiknas, 2005).

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan KTSP, yakni: (a) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik; dan (b) Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Departemen Agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi)

kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum (Mulyasa, 2006). Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk meningkatkan: (a) mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia; (b) kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama; (c) kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.

Karakteristik KTSP bisa diketahui dari optimalisasi kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, kompetensi tenaga kependidikan, serta sistem penilaian yang dilakukan pihak sekolah (Mulyasa, 2006). Lebih lanjut dikemukakan beberapa karakteristik KTSP sebagai berikut: (a) pemberian otonomi yang luas kepada sekolah; (b) partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi; (c) kepemimpinan yang demokratis dan profesional; (d) tim kerja yang kompak dan transparan.

KTSP pada setiap satuan pendidikan meliputi komponen: (1) visi dan misi satuan pendidikan; (2) tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; (3) struktur kurikulum untuk merealisasikan tujuan tersebut; (4) kalender pendidikan satuan pendidikan; (5) silabus; (6) rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Langkah-langkah pengembangan silabus menurut BSNP (2006) meliputi: (a) mengkaji standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam Standar Isi; (b) mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar; (c) mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik siswa; (d) mengembangkan indikator untuk setiap kompetensi serta kriteria pencapaiannya, dan mengelompokkannya sesuai dengan ranah pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai dan sikap; (e) mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi.

Selanjutnya penyusunan KTSP didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan sebagai berikut: (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungannya; (2) beragam dan terpadu; (3)

tanggap terhadap perkembangan IPTEK dan seni; (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja; (6) menyeluruh dan berkesinambungan; (7) belajar sepanjang hayat; (8) seimbang antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah.

Selanjutnya menurut BSNP (2006), ada beberapa aspek yang menjadi acuan operasional dalam penyusunan KTSP, yaitu: (1) peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia. Keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian siswa secara utuh; (2) peningkatan potensi, kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik; (3) keberagaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. (4) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (5) tuntutan dunia kerja. (6) perkembangan IPTEK dan seni. (7) agama. (8) dinamika perkembangan global; (9) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (10) kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (11) kesetaraan gender; dan (12) karakteristik satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan KTSP, kepala sekolah, guru, dan siswa diberi peluang untuk melakukan inovasi di sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk melaksanakan manajemen kurikulum, program pembelajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan dan pembiayaan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, serta dapat melakukan manajemen layanan khusus. Guru dituntut lebih kreatif baik di dalam merancang pembelajaran maupun mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan mampu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan inovasi dan kreativitas siswa. Implikasi terhadap siswa antara lain siswa dituntut untuk: (a) belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, (e) belajar untuk membangun dan mengoptimalkan potensi diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selain itu, dalam implementasi KTSP juga dituntut keterlibatan masyarakat secara aktif melalui peran dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi keterlibatan langsung dalam perumusan pengembangan

kurikulum, proses pelaksanaan maupun dalam evaluasi kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

Cara Penelitian

Kajian ini bertumpu pada upaya pemetaan permasalahan dan potensi pengembangan dan pelaksanaan KTSP jenjang pendidikan dasar di Kota Mataram. Kajian ini dikemas dalam bentuk survei khusus. Melalui survei khusus ini digali, dikaji, dan diorganisasikan informasi secara lengkap dan mendalam tentang peta permasalahan pengembangan dan pelaksanaan KTSP, baik dari sisi guru, siswa, manajemen, kelengkapan input pendukung, maupun dukungan masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Desember Tahun 2009. Keseluruhan aktivitas penelitian dilakukan di sembilan SD/MI dan sembilan SMP/MTs Kota Mataram. Subjek yang terlibat sebanyak sembilan Kepala SD/MI, sembilan Kepala SMP/MTs, 18 Guru SD/MI, dan 27 orang Guru SMP/MTs yang diambil menggunakan *stratified cluster quota sampling* (Suharsimi Arikunto, 2006). Selain subjek tersebut, juga dilibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas, kepala seksi kurikulum, UPTD, dan *stakeholders* lainnya yang diambil secara *purposive sampling* sebagai informan untuk keperluan FGD. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket, kajian dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengklarifikasi dan memverifikasi data hasil angket dan kajian dokumen. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorisasikan, dan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan persentase sederhana dan tabel. Analisis kualitatif dilakukan melalui tiga langkah sebagaimana yang disarankan oleh Miles & Haberman (1984), yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Di dalam proses reduksi data, peneliti memperlakukan data tersebut sesuai prosedur *organizing*, *breaking into manageable units*, *synthesizing*, serta *discovering* sebagaimana dianjurkan Bogdan dan Biklen (1982), sehingga dari analisis data tersebut menghasilkan beberapa hasil temuan penelitian. Guna menjamin keabsahan data, ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang disarankan oleh Nasution (1988) yaitu: (1) kredibilitas, (2) transferabilitas, (3) dependabilitas, dan (4) konfirmabilitas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut: **Pertama**, pada tahun 2008, semua sekolah tingkat SD/MI yang menjadi lokasi penelitian sudah mengembangkan KTSP. KTSP disusun oleh kepala sekolah dengan tidak banyak melibatkan *stakeholders* lainnya. Pengembangannya lebih banyak dilakukan dengan mengadaptasi dari contoh yang sudah ada, disesuaikan berdasarkan karakteristik sekolah. Namun demikian, berdasarkan hasil FGD dengan responden yang berbeda ditemukan bahwa pengembangan KTSP di SD/MI semuanya dilakukan melalui adopsi dari contoh yang sudah ada. Hal ini dilakukan karena terbatasnya pemahaman dan keterampilan guru dalam mengembangkan KTSP. Guru masih mempersepsikan bahwa mengembangkan KTSP sebatas menjabarkan Kompetensi Dasar menjadi sejumlah indikator, tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Belum ada guru yang mengembangkan KTSP dalam arti menambah rumusan SK dan KD, memperdalam kajiannya, memperluas cakupannya, atau meningkatkan kesulitannya. Yang tidak diperbolehkan adalah mengurangi atau menghilangkan rumusan SK dan KD. Sekolah juga tidak menjadikan visi, misi, dan tujuan sekolah sebagai acuan di dalam mengembangkan KTSP. Selain itu, dalam penyusunan KTSP, belum melibatkan guru dan kepala sekolah, kemudian dimintakan pengesahan kepada Dinas Pendidikan/Kandepag Kota. Puskur, LPMP, Perguruan Tinggi, dan Komite Sekolah tidak diundang oleh sekolah dalam proses pengembangan KTSP.

Kedua, pada tahun 2008, semua SMP/MTs di Kota Mataram sudah menyusun KTSP dengan cara mengadaptasi berdasarkan karakteristik sekolah, dan sebagian lainnya mengadopsi dari contoh yang sudah ada. KTSP sebagian besar disusun oleh kepala sekolah bersama guru dan sebagian lainnya dengan melibatkan *stakeholders*. Berbeda dengan hasil FGD, penyusunan KTSP lebih banyak dilakukan dengan cara mengadopsi dari contoh yang sudah ada. Dalam pengembangan KTSP, sekolah belum menjadikan visi, misi, dan tujuan sekolah sebagai acuan. KTSP yang dimiliki merupakan hasil penyusunan pada forum MGMP. Penyusunan KTSP di SMP/MTs lebih banyak melibatkan guru dan kepala sekolah, kemudian dimintakan pengesahan kepada Dinas Pendidikan/Kandepag Kota. Puskur, LPMP, Perguruan Tinggi, dan Komite Sekolah tidak diundang oleh sekolah dalam proses pengembangan KTSP. Rendahnya keterlibatan *stakeholders* tersebut disebabkan

oleh ketidaktuntasan pemahaman berbagai pihak dalam sistem pengembangan KTSP.

Ketiga, pelaksanaan KTSP tingkat SD/MI di Kota Mataram cukup bervariasi. Berdasarkan penelitian terungkap bahwa sebagian besar guru sudah melaksanakan pembelajaran berdasarkan KTSP seperti pembelajaran tematik di kelas rendah, guru telah menyusun silabus dan RPP, keterampilan mendiagnosis sumber-sumber masalah pembelajaran, dan penggunaan LKS dalam pembelajaran. Namun demikian, tidak sedikit juga guru yang mengalami kesulitan dalam hal pemilihan dan penggunaan media, sumber, dan alat pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai, penggunaan diktat/*handout* sebagai sumber belajar siswa, pelaksanaan pembelajaran yang inovatif, keterampilan memberikan layanan khusus (remedial/pengayaan). Dalam menyelesaikan masalah tersebut, guru lebih banyak melakukan komunikasi atau berdiskusi dengan sesama guru dan kepala sekolah sendiri dan sangat jarang yang melakukan komunikasi atau meminta masukan dari pengawas, Dinas Pendidikan Kota/KCD, LPMP, orang tua murid, dan perguruan tinggi.

Di samping itu, pelaksanaan KTSP dihadapkan pada belum terlaksananya secara optimal mata pelajaran muatan lokal (mulok) di sekolah. Indikasi permasalahan ini antara lain: pemahaman konsep mulok yang rendah, kemampuan identifikasi dan penggalan potensi lingkungan yang lemah, dan keterampilan dalam pengembangan serta pelaksanaan mulok yang lemah. Akhirnya sampai saat ini di SD/MI Kota Mataram hanya memprogramkan mata pelajaran mulok Bahasa Sasak dan sebagian sekolah lainnya memprogramkan mulok Bahasa Inggris. Itu pun mereka belum memiliki Standar Isi sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing guru. Hambatan yang dihadapi sekolah adalah kekurangan guru mulok yang kompeten dan sarana prasarana yang tidak memadai.

Keempat, pelaksanaan KTSP tingkat SMP/MTs di Kota Mataram juga cukup heterogen ditinjau dari pengetahuan, sikap, perilaku guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan KTSP. Berdasarkan hasil angket, sebagian besar sekolah sudah mengembangkan pembelajaran IPA/IPS secara terpadu, sudah menyusun Silabus dan RPP, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, memanfaatkan

siswa yang lebih pandai sebagai tutor teman sebaya, pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja siswa, dan pembelajaran dengan mengelompokkan siswa secara heterogen untuk tugas tertentu.

Beberapa hal yang belum banyak dilakukan dan dianggap sebagai masalah oleh guru adalah mendiagnosis masalah pembelajaran, memberikan layanan khusus bagi siswa, keterampilan dasar dalam mengelola pembelajaran, penggunaan *handout*/diktat sebagai sumber belajar, penilaian berbasis kelas, dan pelaksanaan pembelajaran inovatif (seperti penggunaan model pembelajaran portofolio, pembelajaran menggunakan pendekatan terpadu, dan pembelajaran berbasis masalah). Dalam menyelesaikan masalah tersebut, sebagian besar guru meminta bantuan dan berkomunikasi dengan guru dan kepala sekolahnya sendiri atau melalui forum MGMP. Hanya sebagian kecil guru yang melakukan komunikasi dalam penyelesaian masalah pembelajaran dengan guru di sekolah lain, pengawas, KCD, LPMP, orang tua murid/masyarakat, atau perguruan tinggi. Selain permasalahan-permasalahan di atas, terungkap pula bahwa sekolah dalam melaksanakan KTSP masih kesulitan dalam mengembangkan dan melaksanakan mulok. Sebagian besar sekolah hanya memprogramkan mulok Bahasa Sasak dan sebagian sekolah lainnya mulok Bahasa Inggris dalam bentuk mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pelaksanaan KTSP dihadapkan pula pada belum terlaksananya secara optimal mata pelajaran muatan lokal (mulok) di SMP/MTs. Indikasi permasalahan ini antara lain; pemahaman konsep mulok yang rendah, kemampuan identifikasi dan penggalian potensi lingkungan yang lemah, dan keterampilan dalam pengembangan serta pelaksanaan mulok yang lemah. Akhirnya sampai saat ini di SMP/MTs Kota Mataram hanya memprogramkan mata pelajaran mulok Bahasa Sasak dan sebagian sekolah lainnya memprogramkan mulok Bahasa Inggris. Itu pun mereka belum memiliki Standar Isi sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing guru. Hambatan yang dihadapi sekolah adalah kekurangan guru mulok yang kompeten dan sarana prasarana yang tidak memadai.

Kelima, berdasarkan hasil FGD dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) di Kota Mataram dalam mengembangkan dan melaksanakan KTSP. Beberapa di antaranya adalah: (a) pengembangan KTSP di SD/MI Kota Mataram sebagian besar dilakukan dengan

cara mengadopsi dari contoh yang sudah ada. Guru mempersepsikan bahwa pengembangan KTSP sebatas menjabarkan kompetensi dasar menjadi sejumlah indikator, tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Belum ada guru yang mengembangkan KTSP dalam arti menambah rumusan SK dan KD, memperdalam kajiannya, memperluas cakupannya; atau meningkatkan kesulitannya; (b) Semua sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Mataram dalam mengembangkan KTSP belum mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah. Pengembangan KTSP, khususnya komponen silabus dan RPP untuk SD/MI lebih banyak dilakukan pada forum KKG, sedangkan tingkat SMP/MTs dilakukan pada forum MGMP; (c) Pengembangan dan pelaksanaan mata pelajaran mulok jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram sebagian besar hanya Bahasa Sasak dan sebagian sekolah lainnya memprogramkan Bahasa Inggris. Mulok Bahasa Sasak diberlakukan di SD/MI dan SMP/MTs Kota Mataram berdasarkan ketentuan sekolah dan petunjuk Dinas Diknas/Kandepag Kota dan dalam melaksanakan mulok tersebut, guru belum memiliki SK dan KD. Karena pilihan mulok yang terbatas (hanya Bahasa Sasak dan Bahasa Inggris), maka tidak mampu memenuhi minat, bakat, dan kegemaran siswa yang beragam; (d) Hambatan yang dihadapi sekolah dalam mengembangkan dan melaksanakan mata pelajaran mulok adalah kekurangan guru mulok yang kompeten dan sarana prasarana yang kurang memadai; (e) Dalam melaksanakan KTSP pada satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di Kota Mataram, sebagian besar guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran inovatif dan aktif.

Keenam, berdasarkan pemetaan potensi, terungkap beberapa potensi yang dapat dikembangkan dan dilaksanakan sebagai muatan lokal mata pelajaran mulok pada jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram. Beberapa potensi tersebut adalah sosial budaya dan kekayaan alam daerah Lombok, keterampilan produksi dan pengemasan berbagai makanan khas daerah, keterampilan dan kerajinan daerah khas Lombok, sejarah Lombok, seni tari daerah, dan seni musik daerah.

Pasal 1 Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Stándar Isi dan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan (Depdiknas, 2006). Sebagai implikasi dari ketentuan tersebut,

muncullah KTSP sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing sekolah. KTSP memberikan kewenangan kepada pihak sekolah dalam mengembangkan muatan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh sekolah. Namun demikian, dalam menetapkan KTSP dapat dilakukan melalui adopsi dari contoh yang sudah ada, atau adaptasi dari contoh yang sudah ada yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sekolah bagi sekolah yang belum siap mengembangkan sendiri. Pada akhirnya nanti semua sekolah diharapkan dapat mengembangkan sendiri KTSP sesuai dengan karakteristik dan potensi sekolahnya masing-masing.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pendidikan dasar di Kota Mataram (SD/MI dan SMP/MTs) menetapkan KTSP pada Tahun 2007 dan Tahun 2008. Pada saat penelitian dilaksanakan, yaitu pada Tahun 2009, semua pendidikan dasar di Kota Mataram telah menetapkan dan melaksanakan KTSP. Hal ini terjadi karena semua jenjang pendidikan di Kota Mataram pada umumnya mudah mengakses informasi, jumlah guru cukup, dan sebagian besar sekolah sudah melaksanakan KBK Tahun 2004.

Sebagian besar SD/MI dan SMP/MTs mengembangkan KTSP dengan cara mengadopsi dari contoh yang sudah ada. Hal ini terjadi karena terbatasnya pemahaman dan keterampilan guru dalam mengembangkan KTSP. Guru masih mempersepsikan bahwa mengembangkan KTSP sebatas menjabarkan Kompetensi Dasar menjadi sejumlah indikator, tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Belum ada guru yang mengembangkan KTSP dalam arti menambah rumusan SK dan KD, memperdalam kajiannya, memperluas cakupannya, atau meningkatkan kesulitannya. Di sisi lain Diknas mewajibkan sekolah untuk melaksanakan KTSP secara lengkap.

Secara garis besar komponen KTSP terdiri dari Visi dan Misi sekolah, tujuan sekolah, kalender pendidikan sekolah, struktur kurikulum sekolah, silabus, dan RPP. (BSNP, 2006). Visi merupakan gambaran masa depan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh sekolah, kemana sekolah akan dibawa. Dengan demikian, ketika sekolah mengembangkan komponen KTSP lainnya, termasuk silabus dan

RPP, harus mengacu pada rumusan Visi sekolah yang sudah disepakati. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah mengembangkan KTSP tanpa mengacu pada Visi sekolah. Pengembangan KTSP, khususnya komponen silabus dan RPP, untuk SD/MI lebih banyak dilakukan pada forum KKG, sedangkan di SMP/MTs dilakukan pada forum MGMP.

Dalam mengembangkan KTSP, sekolah juga diberikan kesempatan mengembangkan mata pelajaran mulok berdasarkan keunggulan lokal yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, kekayaan alam, dan sumber daya manusia yang ada di daerah. Mulok merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi siswa yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. Keberadaan mata pelajaran mulok merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah lebih meningkat relevansinya dengan keadaan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Mulok merupakan mata pelajaran, sehingga sekolah harus mengembangkan SK dan KD untuk setiap jenis mulok yang diselenggarakan. Sekolah dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran mulok setiap semester. Ini berarti dalam satu tahun sekolah dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran mulok (Puskur Balitbang Depdiknas, 2007).

Temuan penelitian tentang pengembangan dan pelaksanaan mata pelajaran mulok menunjukkan bahwa mata pelajaran mulok di Kota Mataram hanya Bahasa Sasak dan sebagian sekolah melaksanakan Bahasa Inggris. Mulok Bahasa Sasak diberlakukan di SD/MI dan SMP/MTs Kota Mataram berdasarkan ketentuan sekolah dan petunjuk Dinas Diknas Kota. Baik mulok Bahasa Sasak dan Bahasa Inggris belum memiliki SK dan KD. Karena pilihan yang terbatas (hanya Bahasa Sasak dan Bahasa Inggris), maka tidak mampu memenuhi minat, bakat, dan kegemaran siswa yang beragam.

Hambatan yang dihadapi sekolah dalam mengembangkan dan melaksanakan mata pelajaran mulok adalah kekurangan guru mulok yang kompeten, sehingga guru mulok Bahasa Sasak dan Bahasa Inggris sebagian besar tenaga honorer dan guru agama yang tidak selalu kompeten dengan tuntutan pembelajaran mata pelajaran tersebut. Selain itu, dalam pengembangan dan pelaksanaan mulok

ditemukan beberapa hambatan, yaitu: Pemahaman konsep mulok yang rendah, identifikasi dan penggalian potensi lingkungan yang lemah, pemahaman dan keterampilan dalam mengembangkan dan melaksanakan mulok yang lemah, dan sarana prasarana yang kurang.

Bertolak dari hambatan di atas, muncul usulan dari peserta FGD tentang perlunya dilakukan pengkajian potensi sosial budaya dan kekayaan alam daerah Lombok, khususnya Kota Mataram, yang dapat diangkat sebagai materi pokok mata pelajaran muatan lokal di SD/MI dan SMP/MTs. Peserta FGD menyarankan agar dipertimbangkan materi mulok tidak hanya Bahasa Sasak, melainkan juga keterampilan produksi dan pengemasan berbagai makanan khas daerah, keterampilan dan kerajinan daerah khas Lombok, sejarah Lombok, seni tari daerah dan seni musik daerah. Bahkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyarankan agar sekolah memasukkan ketahanan pangan ke dalam kurikulum mulok, terutama makanan khas daerah yang sehat, lezat, tahan lama, dan dikemas secara menarik.

Pada aspek pelaksanaan KTSP, guru dituntut menggelar pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran inovatif adalah proses interaksi belajar yang pro perubahan dalam pembelajaran, dalam arti mampu menumbuhkan dan mengembangkan daya imajinasi, kreasi, inovasi, rasa ingin tahu, dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru. Hal ini mensyaratkan guru yang demokratis dan egaliter serta mampu membebaskan siswa dari tekanan kejiwaan dalam pembelajaran sehingga terbangun individu yang kreatif dan inovatif (Slamet PH, 2007).

Temuan penelitian menunjukkan di antara guru yang sudah ada masih memiliki keterbatasan pada empat kompetensi, terutama kompetensi profesional dan pedagogik. Akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran inovatif dan aktif. Pada sekolah swasta, sebagian besar mata pelajaran diampu oleh guru honorer sehingga sulit distandarisasi kompetensinya.

Kesimpulan

Tingkat pengembangan dan pelaksanaan KTSP jenjang Pendidikan Dasar cukup beragam ditinjau dari pengetahuan, sikap, dan perilaku guru dan kepala sekolah. Secara keseluruhan pengembangan KTSP sudah diupayakan meskipun belum optimal. Pengembangan KTSP di SD/MI Kota Mataram sebagian besar dilakukan dengan cara mengadopsi dari contoh yang sudah ada. Semua sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Mataram dalam mengembangkan KTSP belum mengacu pada Visi, Misi, dan tujuan sekolah. Pengembangan KTSP, khususnya komponen silabus dan RPP, untuk SD/MI lebih banyak dilakukan pada forum KKG, sedangkan tingkat SMP/MTs dilakukan pada forum MGMP.

Semua sekolah kesulitan dalam mengembangkan mulok karena kompetensi sumberdaya sekolah yang masih rendah. Akibatnya, mulok yang diprogramkan sekolah hanya terbatas pada mata pelajaran mulok Bahasa Sasak dan Bahasa Inggris, padahal di Kota Mataram tersedia potensi lokal sosial, budaya, kekayaan alam, keterampilan produksi makanan khas daerah, keterampilan dan kerajinan khas daerah, sejarah Lombok, seni tari daerah, dan seni musik daerah. Karena pilihan mulok yang terbatas (hanya Bahasa Sasak dan Bahasa Inggris), maka tidak mampu memenuhi minat, bakat, dan kegemaran siswa yang beragam.

Dalam pelaksanaan KTSP pada satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di Kota Mataram, sebagian besar guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran inovatif dan aktif.

Untuk menyelesaikan kelemahan-kelemahan tersebut, disarankan kepada semua pihak baik Dinas Diknas dan Kandepag Kota Mataram, guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemangku lainnya dapat mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mengembangkan dan melaksanakan KTSP. Yang perlu mendapatkan perhatian sekolah dalam mengembangkan KTSP adalah perlunya memperhatikan potensi, karakteristik, dan kebutuhan sekolah serta Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah. Dalam melaksanakan KTSP perlu diwujudkan pembelajaran inovatif dan aktif, berorientasi kompetensi, bersifat demokratis, dan memposisikan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran.

Daftar Pustaka

- Bogdan, R.C., Biklen, S.K. (1982). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- BSNP Depdiknas. (2006). *Panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta: BSNP Depdiknas.
- Depdiknas. (2005). *Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2006). *Permendiknas No. 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan peraturan permendiknas No. 22 dan 23 Tahun 2006*. Jakarta: Depdiknas
- Hamalik, O. (2001). *Kurikulum dan pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lembaga Pengembangan Pendidikan Unram. (2008). *Evaluasi pengembangan dan pelaksanaan KTSP 2006*. (Laporan Penelitian). Jakarta: Kerjasama LPP Unram dengan Puslitjaknov Depdiknas dan didukung oleh AuSaid.
- Miles, M.S., & Huberman, A.M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of mew methode*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum tingkat satuan pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (1993). *Pengembangan kurikulum*. Bandung: CV. Cika Aditya Bakti.
- Nasution, S. (1988). *Metodologi penelitian naturalistik-kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Puskur Balitbang Depdiknas. (2007). *Model pengembangan mata pelajaran muatan lokal SD/MI/SDLB - SMP/MTS/SMPLB – SMA/MA/SMALB/SMK*. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas.
- Slamet, PH. (2007). *Pelaksanaan KTSP*, (bahan pelatihan guru SD/SMP yang disampaikan pada Workshop pengembangan KTSP di Kabupaten Bima NTB).